Klaster Filantropi
Lingkungan

Rumah Zakat · Filantropi Indonesia · Amanah Daya Nusantara
Bersama Menjaga Amanah

Laporan Climate Talk Episode 1

Iklim Indonesia: Dulu, Kini, & Masa Depan

Menerjemahkan Komitmen Global Menjadi Aksi Lokal yang Membumi







Greyhound Café Menteng, 8 September 2026

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 03

Sambutan Pembuka 04

Pemaparan Konteks 05

Sesi Para Pembicara 07

Menjembatani Komitmen Iklim dengan Realitas Kehidupan Sehari-hari 07

Memikirkan Kembali Aksi Iklim melalui Pendekatan Sistem dan Nilai-Nilai 09

Panel Diskusi Para Pembicara 11

Melihat Keterkaitan: Hutan, Air, dan Masyarakat 11

Melampaui Manfaat Ekonomi: Ekosistem dan Kesejahteraan 12

Menghubungkan Ekologi, Mata Pencaharian, dan Nilai-Nilai 12

Sesi Tanya Jawab 13

Pokok-pokok Utama 15

Ringkasan Eksekutif

Climate Talk Episode 1 menyoroti masih adanya kesenjangan antara komitmen iklim Indonesia di tingkat nasional dan global dengan cara perubahan iklim dipahami dan dialami pada tingkat masyarakat. Meskipun kebijakan iklim lazim disampaikan melalui konsep-konsep seperti NDC, *net zero*, dekarbonisasi, dan transisi energi, para peserta menekankan bahwa masyarakat mengalami perubahan iklim secara lebih langsung melalui banjir, kekeringan, gagal panen, kerawanan air, kebakaran hutan dan lahan, tekanan terhadap mata pencaharian, serta berbagai konsekuensi ekonomi lainnya. Oleh karena itu, diskusi menegaskan pentingnya menerjemahkan isu iklim ke dalam bahasa dan keterkaitan yang berakar pada pengalaman hidup, nilai-nilai, dan realitas lokal masyarakat. Tantangan iklim Indonesia juga dipandang sebagai persoalan yang saling terkait, bukan semata-mata persoalan lingkungan, karena mencakup keterhubungan antara hutan dan lahan, energi, air, pangan, mata pencaharian, pembangunan ekonomi, dan tata kelola. Fragmentasi dalam perencanaan dan mandat, kapasitas implementasi yang tidak merata, lemahnya penegakan, kepentingan yang saling bersaing, serta pendekatan yang belum konsisten terhadap data, pengukuran, dan komunikasi diidentifikasi sebagai sejumlah tantangan yang memengaruhi efektivitas aksi iklim.

Diskusi memberikan perhatian khusus pada pentingnya beralih dari respons yang terfragmentasi menuju aksi kolektif yang berakar pada konteks lokal. Bapak Agus Purnomo menekankan perlunya memperlihatkan secara nyata keterkaitan ekologis—misalnya dengan menghubungkan hutan dan daerah aliran sungai dengan ketersediaan air, mata pencaharian, dan kesejahteraan yang menjadi tumpuan masyarakat maupun dunia usaha—serta mengomunikasikan isu iklim dengan istilah yang dapat dipahami masyarakat. Bapak Jalal melengkapi pandangan tersebut melalui perspektif *systems thinking*, dengan menekankan bahwa dampak iklim yang tampak perlu dipahami dalam kaitannya dengan struktur yang lebih mendalam, model mental, dan nilai-nilai, serta bahwa respons yang dilakukan perlu bergerak melampaui sekadar membatasi kerusakan lebih lanjut menuju regenerasi ekologis. Diskusi panel dan sesi tanya jawab selanjutnya mengeksplorasi bagaimana teologi, ekologi, dan ekonomi dapat saling memperkuat; bagaimana komitmen global seperti Persetujuan Paris dapat memberikan makna bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak; serta bagaimana ajaran agama dapat dihubungkan dengan tindakan nyata bagi lingkungan. Dalam konteks ini, komunitas keagamaan, rumah ibadah, filantropi, dunia usaha, dan jejaring akar rumput dibahas sebagai sumber potensial bagi kepercayaan, modal sosial, sumber daya, dan kapasitas kolektif untuk aksi iklim.

Pada akhirnya, kegiatan ini mengarah pada suatu pendekatan yang menempatkan nilai-nilai, rasa kepemilikan, kolaborasi, dan komitmen yang berkelanjutan sebagai landasan aksi iklim. Para peserta menekankan bahwa pemahaman mengenai lingkungan perlu melampaui pengetahuan teknis dan terhubung dengan motivasi serta sistem nilai yang telah dikenal dan dipahami masyarakat, sementara para pelaku aksi iklim sendiri perlu mempertahankan komitmen di tengah perubahan kondisi politik, ekonomi, dan kelembagaan. Dalam penutupnya, Bapak Rizal Algamar mengaitkan pembahasan tersebut dengan riset berbasis nilai (*value-based research*) dan segmentasi yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi terhadap perubahan, serta dengan berbagai inisiatif kolaboratif melalui aksi iklim lintas iman dan klaster filantropi lingkungan dan iklim. Dengan demikian, Climate Talk Episode 1 tidak ditutup dengan satu solusi tunggal yang ditetapkan, melainkan dengan penekanan pada pentingnya menyatukan berbagai aktor dan kapasitas, terus menyempurnakan program melalui masukan para pemangku kepentingan, serta menerjemahkan kepedulian dan komitmen bersama menjadi aksi nyata di tengah masyarakat.



Sambutan Pembuka

01

Sumber: Unsplash



Sumber: Dokumentasi Sesi

Sonny Sukada
Direktur Eksekutif Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam sambutan pembukaannya, Bapak Sonny menyoroti kesenjangan antara bahasa yang lazim digunakan dalam konferensi iklim, diskusi kebijakan, dan dokumen formal dengan realitas sehari-hari yang dialami masyarakat. Beliau mengamati bahwa perubahan iklim sering dikomunikasikan melalui terminologi yang kompleks, target emisi, dan konsep seperti *net zero*, sehingga isu tersebut dapat terasa jauh dari kehidupan masyarakat yang tinggal di desa, wilayah perdesaan, dan kawasan pinggiran perkotaan. Padahal, bagi masyarakat tersebut, dampak perubahan iklim telah nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain melalui kenaikan harga pangan yang berkaitan dengan gagal panen, sumur yang mengering, banjir yang semakin sering terjadi, serta kebakaran hutan yang mengancam mata pencaharian. Oleh karena itu, Beliau menyoroti adanya kesenjangan antara proses pengambilan kebijakan tingkat tinggi di Jakarta dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Dengan latar belakang tersebut, Bapak Sukada menjelaskan bahwa Climate Talk Episode 1, yang diinisiasi secara kolaboratif oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia, Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA), dan Rumah Zakat melalui Klaster Lingkungan dan Konservasi, dimaksudkan untuk membantu menjembatani jarak antara komitmen iklim global dan kebutuhan nyata masyarakat akar rumput. Beliau mengingatkan bahwa ketika perubahan iklim dikomunikasikan dengan cara yang terlepas dari pengalaman sehari-hari, aksi iklim berisiko dipersepsikan sebagai tren kalangan elite, alih-alih sebagai isu yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diskusi ini dimaksudkan untuk mendekatkan pembahasan mengenai iklim dengan realitas kehidupan masyarakat serta mendorong para peserta untuk saling mendengarkan dan bertukar pandangan mengenai bagaimana komitmen iklim dapat diterjemahkan menjadi aksi yang berakar pada konteks lokal.

Bapak Sonny menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi, alih-alih bekerja secara terpisah antar-sektor. Beliau menyampaikan bahwa filantropi, komunitas lintas iman, dunia usaha, dan masyarakat akar rumput masing-masing memiliki peran dan kekuatan tersendiri, serta mendorong berbagai pihak tersebut untuk menyatukan kapasitas yang dimiliki. Menurutnya, kolaborasi semacam ini dapat membawa pembahasan melampaui sekadar diskusi menuju aksi nyata yang dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh keluarga-keluarga di berbagai wilayah Indonesia. Beliau mengajak para peserta untuk memanfaatkan Climate Talk sebagai ruang untuk saling mendengarkan, bertukar gagasan, dan mulai membangun bentuk-bentuk kolaborasi yang benar-benar berakar pada realitas lokal.



Pemaparan Konteks

Sumber: Unsplash

02



Sumber: Dokumentasi Sesi

Rizal Algamar
Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Dalam memberikan konteks bagi diskusi, Bapak Rizal menyoroti tantangan dalam menerjemahkan narasi iklim global yang sering kali sangat teknis menjadi isu yang bermakna bagi masyarakat Indonesia. Beliau mengamati bahwa diskusi mengenai iklim mencakup berbagai persoalan yang saling terkait dan kerap dibingkai melalui konsep-konsep seperti ambang batas kenaikan suhu 1,5°C, *Nationally Determined Contributions* (NDC), *net zero*, dekarbonisasi, dan transisi energi. Dengan merujuk pada riset segmentasi berbasis nilai (*value-based segmentation*) yang sedang berlangsung di Jawa, beliau membandingkan narasi tersebut dengan pengalaman nyata masyarakat dalam menghadapi berbagai tekanan terkait iklim, termasuk banjir, kekeringan, gagal panen, serta kesulitan ekonomi yang menyertainya. Riset yang ditampilkan dalam materi presentasinya juga mengidentifikasi kejadian cuaca ekstrem, degradasi ekosistem, kerawanan pangan dan air, serta tekanan terhadap mata pencaharian masyarakat perdesaan sebagai risiko yang berulang. Sementara itu, temuan Tahap 1 menunjukkan bahwa masyarakat memahami gangguan terkait iklim melalui pengalaman, cara pandang, dan nilai-nilai mereka. Oleh karena itu, Beliau menekankan pentingnya menjadikan aksi iklim relevan secara sosial dan dimiliki oleh masyarakat setempat, dengan bertolak dari realitas kehidupan sehari-hari, bukan dari narasi iklim yang abstrak.

Bapak Rizal juga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi konsekuensi dari komunikasi iklim yang tetap terpisah dari persoalan sehari-hari masyarakat, termasuk risiko meningkatnya polarisasi dan resistensi terhadap aksi iklim. Dalam konteks tersebut, beliau menunjukkan potensi peran pihak-pihak yang dipercaya masyarakat, khususnya para pemuka agama, dalam mengomunikasikan isu iklim dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat, dengan merujuk pada inisiatif aksi iklim lintas iman AYANA. Beliau juga mengidentifikasi filantropi sebagai salah satu platform potensial bagi aksi kolektif, dengan mencatat keberadaan lebih dari 100 anggota dalam klaster terkait di Perhimpunan Filantropi Indonesia serta upaya yang kembali diperkuat untuk mendorong kreasi bersama (*co-creation*) dan aksi kolektif. Berbagai pertimbangan tersebut kemudian membingkai pertanyaan yang lebih luas bagi Climate Talk, yaitu bagaimana aksi iklim dapat semakin dimiliki oleh masyarakat setempat dengan menghubungkannya pada realitas ekonomi dan sosial yang mereka alami.

Terakhir, Bapak Rizal mengajak para pembicara dan peserta untuk mengkaji isu-isu iklim yang perlu mendapatkan perhatian strategis di Indonesia, khususnya isu-isu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap emisi nasional, hambatan utama dalam penanganannya, serta sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada telah mendukung tindakan yang efektif. Beliau mengangkat berulangnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai salah satu contoh yang perlu didiskusikan, dengan mempertanyakan mengapa persoalan, penjelasan, dan respons yang serupa terus berulang meskipun peringatan dini berbasis ilmu pengetahuan telah tersedia. Hal tersebut sekaligus mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai sejauh mana pengetahuan ilmiah secara efektif digunakan untuk mendorong tindakan. Dengan demikian, beliau membingkai diskusi seputar kontribusi yang dapat diberikan oleh keahlian ilmiah, aksi iklim lintas iman, filantropi, dan advokasi kolektif, termasuk apakah perubahan kebijakan atau regulasi diperlukan untuk menangani isu-isu iklim prioritas yang teridentifikasi melalui diskusi.



Sumber: Dokumentasi Sesi



Sesi Para Pembicara

Sumber: Unsplash

03

Menjembatani Komitmen Iklim dengan Realitas Kehidupan Sehari-hari



Sumber: Dokumentasi Sesi

Agus Purnomo
Mantan Sekretaris Eksekutif DNPI, Mantan Staf Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim & Lingkungan

Bapak Agus membuka paparannya dengan menyoroti besarnya tantangan perubahan iklim yang dihadapi Indonesia beserta dampaknya terhadap masyarakat, khususnya penduduk wilayah pesisir, petani, dan nelayan. Dalam presentasinya, beliau mengidentifikasi hutan dan lahan, energi, serta limbah sebagai tiga sumber utama emisi gas rumah kaca, sekaligus mengingatkan terbatasnya waktu yang tersedia untuk mengubah lintasan emisi Indonesia agar dapat mencapai target 2030. Beliau merujuk pada berbagai komitmen nasional Indonesia, termasuk NDC, FOLU Net Sink 2030, dan target *net zero*, serta dukungan internasional bagi transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP) senilai USD 20 miliar. Namun, beliau menekankan masih adanya kesenjangan antara berbagai komitmen tersebut dengan pengalaman sehari-hari masyarakat: terminologi teknis mengenai iklim masih sulit dipahami, sementara dampak perubahan iklim dirasakan secara lebih langsung melalui gagal panen, banjir, tekanan terhadap pendapatan dan mata pencaharian, serta berbagai konsekuensi ekonomi lainnya. Beliau juga mengamati bahwa komitmen nasional tidak serta-merta dapat diterjemahkan secara efektif menjadi tindakan di tingkat subnasional dan lokal, sementara manfaat nyata dari pembiayaan dan aksi iklim masih belum jelas bagi banyak masyarakat.

Bapak Agus kemudian memusatkan perhatian pada tantangan implementasi dan tata kelola, termasuk fragmentasi dalam perencanaan dan mandat, keterbatasan kapasitas implementasi pada birokrasi daerah, serta regulasi dan perizinan yang dapat saling bertentangan. Salah satu pesan utamanya adalah bahwa perubahan iklim tidak seharusnya diperlakukan semata-mata sebagai persoalan lingkungan, melainkan juga sebagai persoalan ekonomi dan pembangunan yang memengaruhi mata pencaharian serta kebutuhan sehari-hari. Dalam membahas respons yang diperlukan, beliau mengidentifikasi

lima bidang utama mitigasi—hutan dan lahan gambut, energi, transportasi, limbah, serta pertanian dan pangan—sebelum membedakan upaya jangka panjang untuk mengurangi pemanasan tersebut dari kebutuhan mendesak untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang telah dirasakan saat ini. Beliau menggambarkan adaptasi melalui berbagai kebutuhan praktis, seperti melindungi kawasan pesisir dan sumber air, mempertahankan pepohonan, memperkuat kapasitas lokal, dan meningkatkan pengelolaan limbah. Pembahasannya mengenai praktik pembakaran sampah rumah tangga juga menegaskan pentingnya perubahan perilaku dan budaya, yang menurutnya dapat didukung melalui kontribusi komunitas keagamaan dan organisasi masyarakat sipil.

Terakhir, Bapak Agus menyoroti besarnya kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia dan sumber daya yang saat ini tersedia. Presentasinya menyebutkan estimasi kebutuhan sebesar USD 757,6 miliar hingga tahun 2035, dibandingkan dengan sumber pembiayaan iklim dan transisi yang tersedia saat ini dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Alih-alih memandang kesenjangan tersebut semata-mata sebagai alasan untuk bersikap pesimistis, beliau melihatnya sebagai peluang untuk mempertimbangkan berbagai hal yang dapat dilakukan melalui banyak inisiatif berskala lebih kecil, mobilisasi sumber daya yang lebih luas, dan peningkatan partisipasi publik. Beliau mengakhiri paparannya dengan menyoroti fragmentasi dalam aksi iklim: berbagai organisasi dapat bersaing memperebutkan pendanaan yang terbatas, menggunakan sumber data dan metode pengukuran yang berbeda, serta menyampaikan pesan melalui suara yang berbeda-beda, sehingga kontribusi kolektif mereka sulit untuk ditunjukkan. Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya aksi kolektif yang lebih kuat, termasuk peningkatan kolaborasi serta konsistensi yang lebih baik dalam cara memahami, mengukur, dan mengomunikasikan aksi iklim—yang dirangkum dalam seruan penutupnya untuk membangun keselarasan yang lebih kuat dalam “cara pandang, cara hitung”, serta cara para aktor bekerja bersama.



Sumber: Dokumentasi Sesi

Memikirkan Kembali Aksi Iklim melalui Pendekatan Sistem dan Nilai-Nilai


Sumber: Dokumentasi Sesi

Jalal
Chairperson of the Advisory Board, Social Investment Indonesia

Bapak Jalal membingkai krisis iklim Indonesia melalui pendekatan *systems thinking* (pemikiran sistem), dengan berpendapat bahwa berbagai kejadian yang berulang, seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, deforestasi, dan peningkatan emisi, tidak seharusnya dipahami sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai manifestasi dari suatu sistem yang saling terhubung. Dengan menggunakan *iceberg model* (model gunung es), beliau mengajak peserta untuk melihat lebih jauh di balik berbagai kejadian yang tampak, menuju pola-pola yang berulang, struktur yang mendasarinya, model mental, dan pada tingkat terdalam, apa yang—dengan merujuk pada Otto Scharmer—beliau sebut sebagai "Source", yaitu sumber tempat model-model mental tersebut berawal. Beliau membandingkan orientasi *ego-system*, yang berpusat pada kepentingan individu atau kelompok tertentu, dengan orientasi *eco-system*, yang berfokus pada kesejahteraan kolektif dan keterhubungan. Dalam konteks ini, beliau mengaitkan fragmentasi dan persaingan dalam memperoleh pembiayaan iklim yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya dengan persoalan yang lebih luas, yaitu kecenderungan para aktor untuk mengejar kepentingan masing-masing alih-alih memberikan respons secara kolektif yang sepadan dengan besarnya tantangan iklim.

Dengan menggunakan hubungan-hubungan kausal yang telah diidentifikasi dalam tulisan-tulisannya sebelumnya, Bapak Jalal kemudian menggambarkan sejumlah dinamika yang saling memperkuat dalam sistem iklim Indonesia. Beliau menghubungkan deforestasi dengan berkurangnya kapasitas ekologis, meningkatnya risiko banjir dan tanah longsor, kerugian ekonomi, serta tekanan lanjutan untuk melakukan konversi lahan. Beliau juga menghubungkan sasaran pertumbuhan ekonomi yang ambisius, termasuk hilirisasi dan penggunaan captive coal untuk smelter, dengan peningkatan emisi, risiko iklim, biaya akibat bencana, dan munculnya kembali tekanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beliau mengakui keberadaan berbagai kebijakan dan regulasi terkait iklim dan kebencanaan, namun mengidentifikasi lemahnya implementasi dan penegakan sebagai titik kritis yang menghambat berfungsinya mekanisme korektif sebagaimana dimaksud. Persoalan lainnya, menurutnya, adalah jarak naratif (*narrative distance*) yang muncul ketika perubahan iklim terutama dikomunikasikan melalui terminologi teknis dan global. Berdasarkan pengalamannya bersama masyarakat pesisir, beliau berpendapat bahwa masyarakat dapat memahami perubahan yang terjadi di sekitar mereka—termasuk kenaikan muka air laut dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar—tanpa harus menggunakan kosakata teknis mengenai gas rumah kaca atau kebijakan iklim. Diagram lingkar kausal (*causal-loop diagrams*) dalam presentasinya menggambarkan dinamika tersebut sebagai perangkap deforestasi–bencana–pembangunan (*deforestation–disaster–development trap*), perangkap pertumbuhan–ekstraksi energi (*growth–energy extraction trap*), lingkar penyeimbang kebijakan formal yang lemah (*weak formal-policy balancing loop*), serta lingkar penguatan jarak naratif (*reinforcing narrative-distance loop*).

Dalam menghadapi berbagai tekanan yang saling memperkuat tersebut, Bapak Jalal menyoroti nilai-nilai keagamaan dan adat setempat sebagai jalur yang berpotensi positif untuk memperkuat aksi iklim yang

berakar pada konteks lokal. Beliau menggambarkan bagaimana ajaran agama dapat menghubungkan tanggungjawab menjaga lingkungan dengan persoalan yang telah memiliki makna bagi masyarakat—misalnya kebutuhan untuk menjaga ketersediaan air yang cukup dan bersih untuk berwudu, yang selanjutnya dapat dihubungkan dengan perlindungan hutan di wilayah hulu, sumber-sumber air, dan bantaran sungai. Dalam kerangka pemikiran sistem yang digunakannya, narasi yang memiliki legitimasi lokal semacam ini dapat memperkuat rasa kepemilikan dan pengawasan masyarakat, alih-alih hanya bergantung pada penegakan formal oleh pemerintah. Beliau berpendapat bahwa berbagai pengalaman yang tersebar tersebut perlu dipertemukan melalui bahasa, pendekatan pengukuran, dan teori perubahan (*theory of change*) yang lebih selaras. Menutup paparannya dengan merujuk pada pemikiran Donella Meadows mengenai *leverage points*, beliau menekankan pentingnya bekerja pada tingkat yang lebih mendalam, yaitu paradigma dan nilai-nilai yang mendasarinya, daripada hanya mengandalkan parameter seperti target, subsidi, standar, dan insentif. Meskipun secara pribadi bersikap pesimistis terhadap arah perkembangan krisis iklim, beliau membedakan pesimisme tersebut dari sikap menyerah: pesan penutupnya menegaskan bahwa pengakuan terhadap prospek yang semakin memburuk justru seharusnya memperkuat pentingnya melanjutkan upaya kolektif untuk mengurangi kerusakan dan mendorong perubahan sistemik yang lebih mendalam.



Sumber: Dokumentasi Sesi

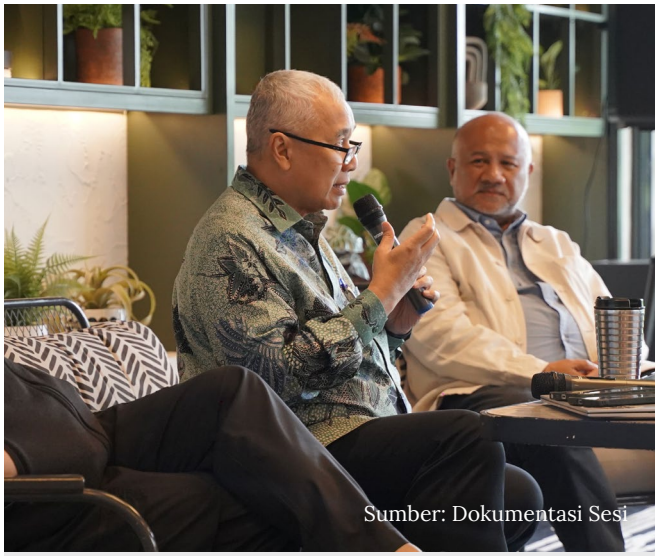


Panel Diskusi Para Pembicara

Sumber: Unsplash

04

Melihat Keterkaitan: Hutan, Air, dan Masyarakat

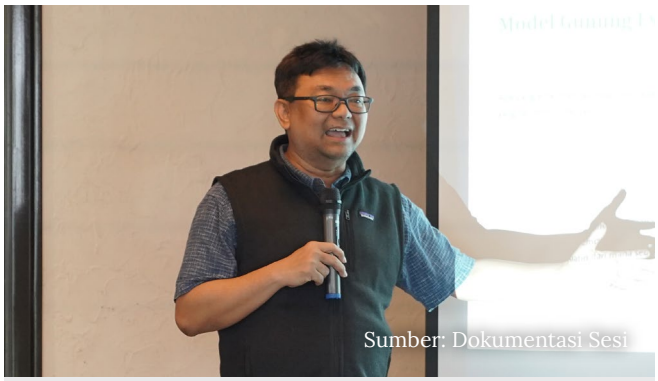


Sumber: Dokumentasi Sesi

Agus Purnomo
Mantan Sekretaris Eksekutif DNPI, Mantan Staf Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim & Lingkungan

Menanggapi pertanyaan moderator mengenai bidang yang perlu menjadi fokus aksi iklim, Bapak Agus mengingatkan agar hutan tidak dipandang sebagai agenda yang berdiri sendiri, melainkan dipahami keterkaitannya dengan sistem-sistem lain, termasuk energi dan, terutama, air. Beliau berpendapat bahwa persoalan lingkungan sering kali terasa jauh secara psikologis ketika keterkaitannya dengan kehidupan masyarakat sendiri tidak terlihat secara nyata: hutan, daerah aliran sungai, atau mata air yang berada di pegunungan yang jauh dapat dipandang sebagai tanggung jawab pihak lain. Dengan memberikan contoh sebuah perusahaan yang berinvestasi dalam perlindungan hutan setelah menyadari bahwa pasokan airnya bergantung pada ekosistem di wilayah hulu, beliau menggambarkan bagaimana pemahaman mengenai saling ketergantungan tersebut dapat membangun motivasi yang lebih kuat untuk bertindak. Menurut Bapak Agus, tantangannya adalah menerjemahkan paradigma lingkungan yang luas menjadi hubungan-hubungan yang dapat dilihat, dirasakan, dan dipahami masyarakat sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan mereka sendiri, sekaligus membangun komunitas berdasarkan kepedulian bersama terhadap hutan, pepohonan, air, dan berbagai sumber kesejahteraan lainnya. Selanjutnya, beliau menekankan pentingnya keahlian komunikasi agar berbagai keterkaitan tersebut dapat disampaikan secara mudah dipahami. Beliau mengamati bahwa diskursus iklim yang bersifat teknis, akademis, dan menggunakan campuran berbagai istilah atau bahasa dapat menjadi hambatan tersendiri; karena itu, komunikasi sebaiknya dimulai dari apa yang secara langsung dialami, diamati, dan dipahami oleh masyarakat.

Melampaui Manfaat Ekonomi: Ekosistem dan Kesejahteraan


Sumber: Dokumentasi Sesi

Jalal
Chairperson of the Advisory Board, Social Investment Indonesia

Bapak Jalal juga menekankan pentingnya membangun kembali keterhubungan masyarakat dengan sistem ekologis yang menopang kehidupan mereka. Dengan merujuk pada pengalamannya bersama komunitas nelayan, beliau menggambarkan bagaimana pemahaman mengenai hubungan antara ekosistem hulu yang sehat, aliran air tawar, dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pesisir telah mendorong komunitas untuk mendukung upaya konservasi di luar wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Menurutnya, menjadikan berbagai keterkaitan tersebut terlihat secara nyata—termasuk membantu masyarakat memahami dari mana air dan pangan yang mereka konsumsi sebenarnya berasal—dapat memperkuat penghargaan terhadap masyarakat dan ekosistem yang menopang kehidupan sehari-hari, sekaligus membantu menerjemahkan paradigma yang abstrak menjadi tindakan nyata. Beliau selanjutnya menggambarkan hubungan tersebut melalui contoh sebuah komunitas di mana restorasi lingkungan telah menghasilkan manfaat bagi mata pencaharian sekaligus mengubah cara masyarakat memaknai kesejahteraan mereka. Bagi Bapak Jalal, manfaat ekonomi merupakan sesuatu yang penting dan nyata, namun masyarakat juga dapat menghargai dimensi spiritual, sosial, dan psikologis dari peningkatan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa makna ekologis, ekonomi, dan keagamaan dapat saling memperkuat, alih-alih saling menggantikan.

Menghubungkan Ekologi, Mata Pencaharian, dan Nilai-Nilai


Sumber: Dokumentasi Sesi

Tanggapan Bersama Pembicara

Secara keseluruhan, tanggapan kedua pembicara memberikan penekanan khusus pada keterkaitan, komunikasi yang bermakna dalam konteks lokal, dan pengalaman hidup masyarakat sebagai landasan bagi aksi iklim. Bapak Purnomo menekankan perlunya mengomunikasikan isu iklim dan lingkungan dengan bahasa yang lebih sederhana dan berakar pada pengalaman masyarakat, alih-alih mengharapkan masyarakat untuk memahami dan terlibat melalui terminologi khusus. Bapak Jalal melengkapi pandangan tersebut dengan menekankan bahwa keterkaitan ekologis dapat menjadi lebih bermakna ketika masyarakat memahami secara langsung bagaimana hutan, air, pangan, mata pencaharian, dan nilai-nilai keagamaan saling terhubung. Menanggapi gagasan moderator mengenai keterkaitan antara teologi, ekologi, dan ekonomi dalam aksi iklim lintas iman, kedua pembicara mengarah pada pendekatan yang bertolak dari pengalaman dan motivasi yang telah dimiliki masyarakat: menjadikan saling ketergantungan ekologis terlihat secara nyata, mengomunikasikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, serta menghubungkan tanggung jawab menjaga lingkungan dengan mata pencaharian dan sistem nilai yang telah dikenal dan dipahami oleh masyarakat.



Sesi Tanya Jawab

05

Sumber: Unsplash

Sesi tanya jawab memperluas pembahasan dari komunikasi iklim ke persoalan tanggung jawab, kerentanan, dan penerjemahan komitmen menjadi tindakan nyata. Para peserta mengangkat peran pemuka agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai praktik-praktik yang merusak lingkungan, sekaligus mempertanyakan bagaimana dampak yang lebih besar dari kegiatan korporasi, termasuk pembukaan hutan, seharusnya ditangani. Intervensi lainnya mengeksplorasi keterkaitan antara teologi, ekologi, dan ekonomi; bagaimana komitmen internasional seperti Persetujuan Paris dapat diterjemahkan menjadi hasil yang bermakna bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak-anak; serta bagaimana komunitas keagamaan dan rumah ibadah dapat berperan sebagai modal sosial bagi ketahanan iklim. Para peserta juga kembali pada tema utama kegiatan dengan mempertanyakan bagaimana kondisi iklim Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu serta bagaimana komitmen global dan keagamaan yang telah ada dapat diwujudkan menjadi aksi nyata di tingkat lokal, alih-alih tetap berada terutama pada tataran konseptual atau kelembagaan.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut secara keseluruhan, Bapak Purnomo menekankan pentingnya mempertahankan komitmen terhadap lingkungan secara berkelanjutan, termasuk ketika kepemimpinan politik, insentif ekonomi, atau narasi yang berkembang mengalami perubahan. Beliau berpendapat bahwa pemahaman mengenai lingkungan perlu melampaui kesadaran intelektual dan tertanam secara memadai dalam nilai-nilai masyarakat agar tidak mudah tergeser oleh berbagai kepentingan yang saling bersaing. Alih-alih berupaya kembali pada kehidupan sebelum era industrialisasi, beliau memusatkan perhatian pada pilihan-pilihan yang dapat dilakukan saat ini: melindungi apa yang masih tersisa, menghentikan kerusakan lebih lanjut, memulihkan kawasan yang telah rusak sejauh memungkinkan, serta memastikan bahwa pembangunan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa pemerintah saja tidak akan cukup untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan kembali menggarisbawahi pentingnya komitmen jangka panjang dari para aktor keagamaan dan komunitas. Refleksi penutupnya—mengenai apakah arah mendasar yang menjadi pegangan seseorang masih tetap sama—menempatkan tanggung jawab tidak hanya pada institusi dan para pemimpin, tetapi juga pada mereka yang berupaya mendorong aksi lingkungan.

Bapak Jalal juga berpendapat bahwa respons yang diperlukan harus bergerak melampaui sekadar menghentikan kerusakan lebih lanjut menuju regenerasi, dengan tanggung jawab yang berlaku bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Beliau membedakan regenerasi dari sekadar mengembalikan kondisi seperti semula setelah terjadinya krisis; menurutnya, yang diperlukan adalah memperbaiki kondisi ekologis, termasuk hutan, sistem tata air, dan berbagai fungsi ekosistem lainnya. Beliau sangat mendukung mobilisasi komunitas keagamaan beserta jejaringnya sebagai modal sosial bagi aksi iklim dan menekankan bahwa komunikasi keagamaan

perlu diwujudkan secara praktis, bukan hanya bersifat teoretis—misalnya dengan menghubungkan ajaran agama mengenai kebersihan atau wudu dengan tindakan nyata dalam menjaga saluran air, sumber air, dan ekosistem di sekitarnya. Dalam melihat masa depan, beliau kembali menyampaikan kekhawatirannya terhadap arah perkembangan krisis iklim, namun menekankan bahwa perbaikan di masa mendatang tetap bergantung pada pilihan yang dibuat saat ini, khususnya kemampuan untuk membayangkan dan menjalankan aksi kolektif. Beliau menyimpulkan bahwa para aktor dapat berkomitmen untuk terus berupaya, tetapi tidak dapat menjamin keberhasilan; karena itu, kemajuan bergantung pada kesediaan untuk terus bertindak dan menemukan pihak-pihak lain yang memungkinkan terbangunnya kolaborasi yang bermakna.



Sumber: Dokumentasi Sesi


Sumber: Dokumentasi Sesi



Pokok-pokok Utama

06

Sumber: Unsplash

Dalam sambutan penutupnya, Bapak Rizal Algamar kembali menekankan pentingnya nilai-nilai, rasa kepemilikan, dan aksi kolektif dalam menerjemahkan komitmen iklim menjadi tindakan yang bermakna di tingkat masyarakat. Merujuk pada riset berbasis nilai (*value-based research*) dan pendekatan segmentasi yang sedang dikembangkan, beliau menekankan bahwa kelompok masyarakat yang berbeda mungkin perlu dilibatkan dengan pendekatan yang berbeda pula. Beliau juga mendorong para peserta untuk terus memberikan gagasan, masukan, dan kritik konstruktif seiring dengan pengembangan berbagai inisiatif kolaboratif melalui aksi iklim lintas iman serta klaster filantropi lingkungan dan iklim. Beliau menutup Climate Talk Episode 1 dengan kembali menegaskan pentingnya berbagai aktor untuk bekerja bersama dalam menerjemahkan kepedulian dan komitmen bersama menjadi aksi nyata.

Diskusi sepanjang Climate Talk Episode 1 menyoroti empat pokok utama yang saling berkaitan:

Pokok Utama	Intisari
1 Menerjemahkan komitmen iklim ke dalam realitas kehidupan masyarakat	Terminologi iklim serta komitmen di tingkat nasional maupun global menjadi lebih bermakna ketika dihubungkan dengan pengalaman langsung masyarakat terkait air, pangan, mata pencaharian, banjir, kekeringan, hutan, dan berbagai persoalan sehari-hari lainnya.
2 Menjadikan saling ketergantungan ekologis terlihat secara nyata	Hutan, air, energi, pangan, mata pencaharian, dan pembangunan ekonomi saling berkaitan. Menjadikan keterkaitan tersebut terlihat secara nyata dapat membantu masyarakat memahami mengapa perlindungan lingkungan relevan bagi kesejahteraan mereka sendiri.
3 Menghubungkan aksi iklim dengan nilai-nilai dan jejaring sosial yang dipercaya masyarakat	Nilai-nilai keagamaan, komunitas keagamaan, rumah ibadah, dan jejaring masyarakat lainnya yang dipercaya dapat membantu menghubungkan tanggung jawab menjaga lingkungan dengan motivasi, praktik, dan nilai-nilai yang telah dikenal dan dipahami dalam konteks lokal.
4 Beralih dari upaya yang terfragmentasi menuju aksi kolektif	Pemerintah, filantropi, dunia usaha, komunitas keagamaan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat akar rumput memiliki kapasitas yang berbeda dan saling melengkapi. Kolaborasi dan pendekatan yang berakar pada konteks lokal dapat membantu menerjemahkan komitmen bersama menjadi aksi nyata di tingkat masyarakat.



amanahdaya.org
©2026